

## ABSTRACT

### **POLICY GOVERNANCE OF LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT POST-COVID-19 PANDEMIC IN THE NEW NORMAL ERA (StudyDinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

**By :**  
**NYIAYU KARTIKA PURNAMASARI**

*The Regional Tourism Development Master Plan (Ripparda) of Pesawaran Regency, Pesawaran Regency Government emphasized that the vision of Pesawaran Regency's tourism development is to become a leading and highly competitive tourist destination for the welfare of the community. Great tourism potential to be developed in Pesawaran Regency, including beaches, mountains, waterfalls, islands, and plantations that are interesting to visit as tourist destinations. The tourism sector has been predicted as the second largest source of foreign exchange contribution for Indonesia.*

*Since early 2020, the tourism sector has experienced a significant weakening due to Covid-19. The implementation of large-scale restrictions and lockdowns during the pandemic certainly had a huge impact on tourism in Indonesia, especially Lampung tourism. A number of stimuli prepared by the government to revive the tourism sector were unable to stem the negative impact of this epidemic, including coordination with related institutions to save the tourism sector, preparing cooperation with hotel chains to be converted into residences for medical personnel and task forces in various regions.*

*The type of research used in this research is descriptive type with a qualitative approach, data collection techniques, observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the Lampung Tourism Development Policy Governance after the Covid-19 Pandemic In the New Normal Era it can be concluded that the Pesawaran Regency Tourism Governance Policy has used the concept of metagovernance with the application of one village one destination post-covid-19. During the start of the Covid-19 pandemic, it had a very bad impact on the tourism sector in Pesawaran Regency.*

**Keywords : Policy, Metagovernance , Tourism**

## ABSTRAK

### **TATA KELOLA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA LAMPUNG PASCA PANDEMI COVID-19 PADA ERA NEW NORMAL (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran)**

**OLEH :**  
**NYIAYU KARTIKA PURNAMASARI**

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa Visi pengembangan pariwisata Kabupaten Pesawaran adalah menjadi destinasi wisata unggulan dan berdaya saing tinggi untuk kesejahteraan masyarakat. Potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan di Kabupaten Pesawaran antara lain mulai dari pantai, pegunungan, air terjun, pulau, serta perkebunan yang menarik untuk dikunjungi sebagai tujuan wisata sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai sumber kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia.

Semenjak awal 2020, sektor pariwisata mengalami pelemahan yang signifikan karena Covid-19. Diterapkan kebijakan pembatasan skala besar dan lockdown selama pandemi tersebut tentunya memberikan dampak yang begitu besar terhadap kepariwisataan yang ada di Indonesia terkhusus pariwisata Lampung. Sejumlah stimulus yang disiapkan pemerintah untuk membangkitkan sektor pariwisata tak mampu membendung dampak negatif wabah ini diantaranya koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk dapat menyelamatkan sektor wisata, menyiapkan kerja sama dengan jaringan hotel untuk dialih fungsikan menjadi tempat tinggal para tenaga medis dan gugus tugas di berbagai daerah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Pariwisata Lampung Pasca Pandemi Covid-19 Pada Era New Normal dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Tata Kelola Pariwisata Kabupaten Pesawaran telah menggunakan konsep metagovernance dengan pengaplikasian one village one destination pasca covid-19. Dalam masa dimulainya Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat buruk pada sektor pariwisata di Kabupaten Pesawaran.

**Kata Kunci : Kebijakan, Metagovernance, Pariwisata.**